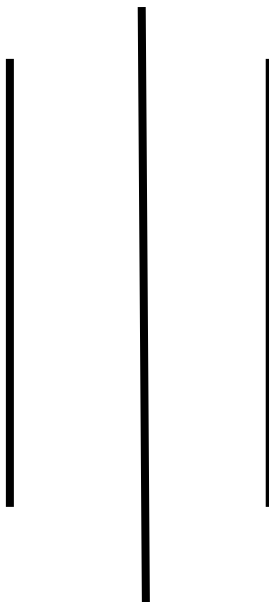




PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



INSPEKTORAT
KABUPATEN GRESIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, tujuan dan proses yang diperlukan untuk mencapai sasaran kerja dalam periode 1 (satu) tahun ke depan setelah adanya hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan. Dengan adanya rencana kerja, dapat memahami skala sebuah proyek dengan lebih baik. Melalui penyusunan Perubahan Renja PD pula Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik dapat menjadikan tugas-tugas lebih ringan sekaligus mengetahui apa saja yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik untuk periode 1 (satu) tahun ke depan. Adapun tahapan penyusunan Perubahan Renja PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yaitu :

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- d. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- e. Penetapan

Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Renja PD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Perubahan Renja PD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Perubahan renja PD adalah bagian yang utuh dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat 2025-2029. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 8 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23

tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Inspektorat Kabupaten Gresik menyusun Perubahan Renja PD tahun 2025 sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada visi misi Bupati Gresik terbaru, RPJMD 2025-2029, rancangan akhir RKPD 2025, Renstra Inspektorat tahun 2025-2029, serta mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan tahun berjalan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2021-2026.
17. Perbup Gresik No 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2025 bertujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun berjalan.

Berikut tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah :

- a. Mengoptimalkan peran fungsi perencanaan dalam pembangunan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana anggaran kerja dan pelaksanaan tugas di Inspektorat dalam jangka periode 1 (satu) tahun.
- d. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan instansi dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistem penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 TRIWULAN I

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - 2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - 2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - 2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat Daerah

- 2.1.6 Kebijakan/tindakan perubahan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD
 - 2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Gresik
 - 2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi, dan misi Kepala Daerah
 - 2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kabupaten Gresik
 - 2.3.5 Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan
 - 3.3.1 Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan
 - 3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan
 - 3.3.3 Kesesuaian Rumusan Program dan Kegiatan antara Rancangan Akhir Perubahan RKPD dengan Perubahan Renja PD

BAB IV : RENCANA KERJA

BAB V : PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting dalam Perubahan Penyusunan Renja
- 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
TAHUN 2025 TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2025 Triwulan I dan Capaian Renstra Inspektorat

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Gresik tahun berjalan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja Inspektorat Kabupaten Gresik, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Telaah hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2025 Triwulan I

Pada tahun 2025 Triwulan I Inspektorat Kabupaten Gresik memiliki plafon anggaran sebesar Rp. 31.752.718.355,25 (termasuk perubahan) yang terdiri dari 3 program, 11 kegiatan dan 34 subkegiatan:

- Anggaran Belanja Operasi senilai Rp. 30.324.045.255,25 yang terealisasi sebesar Rp. 2.585.190.111,59 dengan capaian fisik 26,33% dan capaian kinerja keuangan sebesar 8,14%.
- Anggaran Belanja Modal senilai Rp. 1.428.672.100 terealisasi sebesar Rp. 0 dengan capaian kinerja fisik sebesar 0 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 0 %.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 Triwulan I pada Inspektorat Kabupaten Gresik masih terdapat kendala kendala yang tidak memenuhi target kinerja terdiri dari 3 (Tiga) Program, 8 (Delapan) Kegiatan dan 29 (Dua puluh sembilan) Subkegiatan yang berimbas pada pelaksanaan program/kegiatan tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Realisasi Program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 Triwulan I yang memenuhi target kinerja terdiri dari 2 (Dua) program, 4 (Empat) kegiatan dan 5 (Lima) Subkegiatan, sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.

Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja, di Inspektorat Kabupaten Gresik tidak ada Subkegiatan yang melebihi memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yang tertuang pada tabel 2.1.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

- 1) Program/Kegiatan yang tidak mencapai target :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
 - b. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - c. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Penyebab :

Karena adanya efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 dan SE Bupati Gresik No 900/329/437.61/2025, maka pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi anggaran dan RAK nya serta dilakukan berdasarkan prioritasnya. Sehingga progress realisasi capaian kinerja dan keuangan masih jauh dari target.

- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada Sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
 - a. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - b. Reviu Laporan Kinerja.
 - c. Reviu Laporan Keuangan.
 - d. Pengawasan Desa.
 - e. Kerjasama Pengawasan Internal.
 - f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu pada Sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Penyebab:

Karena adanya efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 dan SE Bupati Gresik No 900/329/437.61/2025, maka pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi anggaran dan RAK nya serta dilakukan berdasarkan prioritasnya. Sehingga progress realisasi capaian kinerja dan keuangan masih jauh dari target.

c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi pada Sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Penyebab:

Karena adanya efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 dan SE Bupati Gresik No 900/329/437.61/2025, maka pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi anggaran dan RAK nya serta dilakukan berdasarkan prioritasnya. Sehingga progress realisasi capaian kinerja dan keuangan masih jauh dari target.

2) Program/Kegiatan yang memenuhi target yang Ditetapkan :

Dari 3 (Tiga) program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 34 (Tiga puluh empat) Subkegiatan yang ada, terdapat 4 (Empat) kegiatan dan 5 (Lima) Subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor.

3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi pada Sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
 - b. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Penyebab :

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan dan nilai target bukan merupakan akumulasi kegiatan dalam setahun tapi dalam satu kali kegiatan sudah mencakup target (jumlah unit yang terlibat dalam 1 kali kegiatan). meskipun terdapat beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya tidak sesuai (lebih kecil dari yang dianggarkan dikarenakan adanya kebijakan efisiensi).

3) Program/Kegiatan yang melebihi dari target yang ditetapkan :

Tidak ada sub kegiatan yang realisasinya melebihi dari target yang telah ditentukan selama triwulan I tahun 2025 berjalan ini.

2.1.5 Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik

Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perubahan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil oleh Inspektorat Kabupaten Gresik

Kebijakan/tindakan perubahan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil oleh Inspektorat Kabupaten Gresik antara lain :

- a. Perencanaan program kegiatan Inspektorat secara konsisten mengacu pada Renstra Inspektorat yang telah tersusun selama 5 (lima) tahun anggaran kecuali jika Perubahan RPJMD, RKPD kabupaten serta RENSTRA Inspektorat terbaru dan ada Subkegiatan

atau Kegiatan yang sangat mendesak (mandatory) dan perlu dilaksanakan pada tahun anggaran tertentu, maka proses perubahan perencanaan ini dituangkan dalam rencana kerja Inspektorat tiap tahun anggaran yang berjalan pada Perubahan APBD nya di Triwulan III atau IV. Proses penyusunan perubahan perencanaan program/kegiatan/subkegiatan tidak terlepas dari tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Gresik yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. Proses penganggaran program/kegiatan/subkegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik diupayakan efisien, efektif, dan ekonomis dengan berpedoman pada regulasi-regulasi penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sehingga kebutuhan anggaran untuk program/kegiatan/subkegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Gresik sesuai dengan kebutuhan kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik.

Tabel 2.1 **(T-C.29)**
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Triwulan I
 Kabupaten Gresik
 Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun(n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n) 2025 TW I	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 TW I	
					Targe t Renja PD tahun (n-1) 2024	Realisas i Renja PD Tahun (n-1) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisas i Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun (n) 2025 TW I %	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(4)
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01	INSPEKTORAT									
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	600%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	144	48	7	7	100%	7	3	43%

6.01.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	144	54	6	6	100%	6	3	50%
6.01.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	144	48	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	144	48	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	144	48	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	144	48	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	144	50	2	2	100%	2	0	0%
6.01.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144	49	1	1	100%	1	0	0%
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72	27	3	3	100%	3	2	67%
6.01.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	70	46	46	100%	46	46	100%

6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	144	50	2	2	100%	2	1	50%
6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	144	49	1	1	100%	1	0	0%
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pendidikan dan Latihan yang diikuti	156	129	3	3	100%	3	1	33%
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	156	154	28	28	100%	28	7	25%
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	36	21	7	7	100%	6	2	33%
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	50	50	50	100%	50	0	0%
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	20	6	6	100%	6	2	33%
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72	36	12	12	100%	10	0	0%
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	54	24	6	6	100%	6	0	0%

6.01.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500	719	250	250	100%	150	51	34%
6.01.01.2.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6	1	1	1	100%	1	0	0%
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42	17	-	-	-	50	0	0%
6.01.01.2.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11	13	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.07.000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	5	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42	17	-	-	-	50	0	0%
6.01.01.2.07.000 9	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	18	2	2	100%	8	2	25%
6.01.01.2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2340	1399	2	2	100%	2	1	50%
6.01.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	21	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	24	8	8	100%	8	8	100%
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	600	317	117	117	100%	50	14	28%

6.01.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	3	1	1	100%	1	1	100%
6.01.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96	48	16	16	100%	16	4	25%
6.01.01.2.09.000 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	5	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	600	300	100	100	100%	50	9	18%
6.01.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	1	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.09.001 0	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	1	0	0%
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut audit internal	600%	346%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tindak lanjut audit eksternal	600%	255,02 %	100%	100%	100%	100%	88,41%	88,41%
		Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	600%	300%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A	600%	279%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	35	447	7	7	100%	7	4	57%

		Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Eksternal	5	8	1	2	200%	1	1	100%
		Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	-	5	3	5	166%	4	5	125%
		Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	-	3	1	3	300%	3	3	100%
		Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit aplikasi SPBE	-	3	1	3	300%	3	3	100%
		Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	-	1	1	1	100%	3	0	0%
		Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi ARG dan PPRG	-	1	1	1	100%	1	0	0%
6.01.02.2.01.000 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	182	160	35	35	100%	35	5	14%
6.01.02.2.01.000 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	170	117	35	35	100%	35	2	6%
6.01.02.2.01.000 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	114	58	22	22	100%	22	6	27%
6.01.02.2.01.000 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	302	220	60	60	100%	60	23	38%
6.01.02.2.01.000 5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	64	49	16	16	100%	16	0	0%
6.01.02.2.01.000 6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	8	3	1	1	100%	1	0	0%

6.01.02.2.01.000 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12	10	2	4	200%	4	1	25%
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	24	37	2	2	100%	2	1	50%
6.01.02.2.02.000 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	56	27	12	12	100%	12	0	0%
6.01.02.2.02.000 2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	48	32	12	12	100%	12	6	50%
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	600%	300%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Jenis Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasnya yang Disusun	-	1	1	1	100%	1	1	100%
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-	5	5	5	100%	5	1	20%
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	212	140	46	46	100%	46	46	100%
		Jumlah Unit Pelayanan yang memperoleh Predikat WBK/WBBM	8	2	2	2	100%	2	0	0%
6.01.03.2.02.000 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	212	140	46	46	100%	46	46	100%

6.01.03.2.02.000 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	190	94	-	-	-	46	0	0%
6.01.03.2.02.000 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	72	29	5	5	100%	5	2	40%
6.01.03.2.02.000 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	190	140	46	46	100%	46	46	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Gresik mengampu misi ke-4 dari Kepala Daerah Terpilih yaitu “Meningkatkan sistem pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada pelayanan yang terbaik bagi masyarakat”. Misi ini merupakan tujuan dari Inspektorat Kabupaten Gresik yang dijabarkan dalam sasaran Inspektorat yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit“ Sesuai dengan perannya selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Gresik telah menetapkan program pengawasan yang tertuang pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) berdasarkan PPBR yang diatur dengan ketetapan Inspektur Kabupaten Gresik, dan berikut kami sajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Gresik

No	Sasaran	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Standar Nasional	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	100%	100 %	90,0 5%	90,1 0%	90,02 %	88,4 1%	90,0 5%	90,1 0%	
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Standar Nasional	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	83	83,5	86,5 7	86 ,7 7	85,8	86,3 7	86,5 7	86 ,7 7	
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui PM SPIP Terintegrasi	Standar Nasional	Nilai Maturitas SPIP	3	3	3,35	3,40	3	3,34	3,35	3,40	
			Nilai kapabilitas APIP	3	3	3,09 5	3.10 5	3	3,08 5	3,09 5	3.10 5	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Gresik

Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik yaitu:

Tugas: Membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
8. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk tingkat kinerja pelayanan inspektorat diukur berdasarkan capaian kinerja pelayanannya yang terdiri dari komponen sasaran renstra dengan indikatornya yang dinilai realisasinya terhadap targetnya di tiap akhir tahunnya sebagaimana pada laporan LKjIPnya inspektorat.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Gresik

Permasalahan strategis yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Gresik pada saat ini :

1. Adanya tuntutan peran APIP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mempertahankan opini BPK tetap status WTP;
2. Adanya tuntutan peran APIP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan pada semua perangkat daerah, BUMD dan Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas;
3. Optimalisasi peran APIP sebagai *Quality Assurance* (Penjamin kualitas) dan *consulting* (konsultan) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Implementasi capaian aksi pencegahan korupsi melalui SPIP Terintegrasi, MCP KPK, Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
5. Peningkatan kompetensi APIP inspektorat Kabupaten Gresik dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pendampingan secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel dengan target pencapaian level kapabilitas APIP sesuai standar *internal audit capability model* (IACM).

2.3.3. Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Dampak terhadap visi dan misi dari program serta kegiatan yang dicapai sebagai berikut :

Pada visi dan misi ke 4 Bupati Gresik yaitu Meningkatkan sistem pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sedangkan sasaran nya yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit. Dengan indikatornya berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (sAKiP) dengan target senilai A maka program, kegiatan dan sub kegiatan pada renja inspektorat

ini sangat signifikan pengaruhnya terutama sub kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah dan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, sedangkan untuk capaian program nasional berdasarkan indikator dibawah ini :

1. Maturitas SPIP level 3;
2. PK APIP level 3
2. Nilai Rata-rata Sakip minimal A (>80-90);
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian;
4. MCP Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan nilai indeks sebesar 92, 16 %;
5. Prosentase Tindak lanjut hasil Pengawasan;
 - a. Pengawasan Internal sebesar 100%
 - b. Pengawasan Eksternal sebesar 88,41 %
 - c. Pengaduan Masyarakat sebesar 100%

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Tantangan :

1. Masih kurangnya jumlah SDM auditor dan PPUPD maupun fungsional pendukung APIP lainnya;
2. Sumber daya APIP masih perlu ditingkatkan kompetensinya secara merata;
3. Kurangnya pemahaman entitas terhadap tindak lanjut temuan hasil pengawasan internal maupun eksternal;
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) belum diimplementasikan secara optimal oleh Kepala PD pada lingkungan perangkat daerahnya.

Peluang :

1. Dukungan regulasi yang telah memadai;
2. Komitmen Kepala PD untuk melaksanakan SPIP dan Pembangunan ZI sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar lembaga APIP (secara vertikal) dalam penyusunan rencana pengawasan dan evaluasinya;
4. Dukungan kesempatan peningkatan kompetensi APIP;

5. Dukungan Stakeholder.

2.3.5. Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Pemulihan dan kebangkitan (akselerasi pertumbuhan) ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada kehidupan masyarakat dengan fokus isu strategis tahun 2025 yaitu pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan, peningkatan pariwisata, sistem persampahan serta fokus pengawasan tata kelola pada pengelolaan APBD, Pelayanan publik (Perizinan dan RS), keuangan desa telah membawa dampak terjadinya perubahan dalam sistem penganggaran, pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kondisi ini, sebagai dampak signifikan sejak dicanangkannya paket Undang-undang bidang Keuangan Negara Tahun 2003 (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara), sehingga dapat dirumuskan menjadi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Mempertahankan opini BPK tetap status WTP;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan berkualitas;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
5. Peningkatan level Kapabilitas APIP dan Level Maturitas SPIP.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut di atas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Dari sisi anggaran terdapat usulan RKPD yang belum terpenuhi yaitu bahwa inspektorat daerah wajib memiliki alokasi anggaran sebesar minimal 0,5% diluar gaji dan TPP dari total belanja daerah pada APBD

kabupaten Gresik dengan nilai di atas Rp. 2.000.000.000.000. (dua triliun rupiah). untuk kegiatan baru yang diusulkan tahun sebelumnya dan masih menjadi isu pengawasan strategis seperti Survei Penilaian Intergitas (SPI) dari KPK maupun kegiatan Monitoring Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan monitoring pengendalian inflasi oleh Kemendagri yang wajib di fasilitasi kegiatannya dan dianggarkan secara memadai oleh pemerintah daerah.

Inspektorat Kabupaten Gresik mengupayakan adanya perubahan Renja pada SIPD melalui rencana strategis sampai dengan rancangan awal maupun rancangan akhir renja yang di fasiltasi pada forum KUA-PPAS APBD 2025, sehingga seluruh usulan Renja Inspektorat Kabupaten Gresik 2025 dapat difasilitasi oleh BAPPEDA Kabupaten Gresik.

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan akhir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, **Tabel T-C.31:**

Tabel 2.3 **(Tabel T-C.31)**
 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
 Kabupaten Gresik
 Inspektorat

	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Penti ng
N o.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Capa ian 2025	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Capa ian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INSPEKTORAT				18.747.60 5.741	INSPEKTORAT				31.752.718. 355,25	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspekt orat	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100 %	11.398.65 2.536	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspekt orat	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100 %	18.579.538. 755	
1. 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7	154.039.9 84	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7	268.350.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	123.474.52 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	226.194.600	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspekt orat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspekt orat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspekt orat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspekt orat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspekt orat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	13.985.876	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspekt orat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	19.123.600	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	16.579.584	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	23.031.800	
1. 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	7.982.026 .325	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	9.596.414.8 95	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspekt orat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	7.959.256. 279	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspekt orat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	9.566.234.89 5	

9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Inspekt orat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	12.210.046	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Inspekt orat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	24.420.000	
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	10.560.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	5.760.000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Pendidikan dan Latihan yang diikuti	3	912.534.691	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Pendidikan dan Latihan yang diikuti	3	2.390.108.600	
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspekt orat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28	912.534.691	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspekt orat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34	2.390.108.600	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	1.367.618.690	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	4.198.553.220	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspekt orat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	124.351.220	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspekt orat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	210.759.800	
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspekt orat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspekt orat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspekt orat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	219.701.860	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspekt orat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	534.995.100	
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspekt orat, Luar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	64.673.275	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspekt orat, Luar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	91.822.100	

1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	24.761.235	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	51.611.000	
1 7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspekt orat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	309.356.90 0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspekt orat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	1.360.049.52 0	
1 8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	624.774.20 0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1.949.315.70 0	
1. 5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspekt orat	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	250.000.0 00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspekt orat	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50	649.731.840	
1 9	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspekt orat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspekt orat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	
2 0	Pengadaan Mebel	Inspekt orat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	Pengadaan Mebel	Inspekt orat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	
2 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspekt orat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	250.000.00 0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspekt orat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50	649.731.840	
1. 6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	272.196.0 00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspekt orat	Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	293.918.000	
2 2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspekt orat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	8.700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspekt orat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	11.990.000	

2 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Inspekt orat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	263.496.00 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Inspekt orat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	281.928.000	
1. 7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspekt orat	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	460.236.8 46	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspekt orat	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	1.182.462.2 00	
2 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspekt orat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	109.394.35 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspekt orat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	104.920.900	
2 5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspekt orat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	301.890.00 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspekt orat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	939.359.500	
2 6	Pemeliharaan Mebel	Inspekt orat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	Pemeliharaan Mebel	Inspekt orat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	
2 7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspekt orat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	48.952.496	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspekt orat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	116.149.800	
2 8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspekt orat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspekt orat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	22.032.000	

2	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	SKPD di Lingku ngan Pembkab Gresik	Persentase tindak lanjut audit internal	100 %	2.731.362 .448	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	SKPD di Lingku ngan Pembkab Gresik	Persentase tindak lanjut audit internal	100 %	4.417.292.2 00	
			Persentase tindak lanjut audit eksternal	100 %				Persentase tindak lanjut audit eksternal	100 %		
			Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	100 %				Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	100 %		
			Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A	100 %				Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A	100 %		
2. 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	SKPD di Lingku ngan Pembkab Gresik	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7	2.473.841 .246	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	SKPD di Lingku ngan Pembkab Gresik	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7	4.224.612.1 00	
			Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Eksternal	1				Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Eksternal	1		
			Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4				Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4		
			Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2				Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2		
			Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2				Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2		
			Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1				Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1		
			Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi ARG dan PPRG	1				Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi ARG dan PPRG	1		

29	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35	574.633.609	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35	1.135.049.100	
30	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35	356.623.201	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35	27.999.900	
31	Reviu Laporan Kinerja	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	22	281.361.533	Reviu Laporan Kinerja	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	22	460.902.000	
32	Reviu Laporan Keuangan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	60	484.397.925	Reviu Laporan Keuangan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	60	28.607.000	
33	Pengawasan Desa	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	18	144.954.156	Pengawasan Desa	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	18	59.261.000	
34	Kerjasama Pengawasan Internal	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	351.907.821	Kerjasama Pengawasan Internal	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	1.600.283.700	
35	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	279.963.001	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	912.509.400	

2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2	257.521.202	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2	192.680.100	
36	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12	102.407.050	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12	13.589.500	
37	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	155.114.152	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	179.090.600	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	100 %	4.617.590.757	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	100 %	8.755.887.400	
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Jenis Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasnya yang Disusun	1	54.812.967	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Jenis Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasnya yang Disusun	1	121.102.200	
38	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5	54.812.967	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5	121.102.200	
39	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	0	0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	0	0	

3. 2	Pendampingan dan Asistensi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	46	4.562.777.790	Pendampingan dan Asistensi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	46	8.634.785.200	
			Jumlah Unit Pelayanan yang memperoleh Predikat WBK/WBBM	2				Jumlah Unit Pelayanan yang memperoleh Predikat WBK/WBBM	2		
4 0	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	46	2.014.189.991	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	46	2.960.038.000	
4 1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	0	100.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	46	102.394.000	
4 2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	2.021.816.786	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	4.601.943.700	
4 3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46	426.771.013	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46	970.409.500	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat adalah lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang sesuai tugas dan kewenangannya dalam paradigma baru yaitu menjadi *quality assurance* dan *counsulting partner* bagi tata kelola pemerintah sehingga terkait dengan masalah tata kelola pemerintah dan tidak terkait langsung dengan masyarakat umum di mana hal tersebut sudah diatur dalam peraturannya. Inspektorat berinteraksi dengan masyarakat bila ada laporan pengaduan, dan hal tersebut difasilitasi dengan audit tujuan tertentu.

Table 2.4 (Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Gresik
Inspektorat

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	Gresik	Jumlah Pelaksanaan Penilaian Integritas	1 Kegiatan	
2	Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Gresik	Jumlah Laporan Monitoring P3DN	1 Kegiatan	
3	Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Gresik	Gresik	Jumlah Laporan Monitoring Pengendalian Inflasi daerah	1 Kegiatan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina kapabilitas APIP telah menerbitkan panduan bagi APIP meningkatkan kapabilitasnya melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019. Sedangkan teknis rinci pelaksanaannya dijelaskan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah RI menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2024 berada pada level 3. Kapabilitas APIP berdasarkan model ini dikelompokkan ke dalam lima level yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan level tertinggi Level 5 (Optimizing). Setiap level dibangun melalui enam elemen: Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan secara online melalui website BPKP, Inspektorat Kabupaten Gresik sudah berada di level 3. Inspektorat Kabupaten Gresik telah berkomitmen sanggup dan akan merencanakan peningkatan kapabilitas APIP yang mengacu IACM menjadi level 3 pada 2023 dan menjadi level 3 pada 2024 sesuai target nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik akan mendukung keberhasilan target nasional peningkatan kapabilitas APIP. Pada RPJMN 2020-2024, pemerintah RI juga menargetkan tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berada di level 3 dari skor 1-5 pada tahun 2024. Pada tahun 2021 nilai maturitas SPIP Kabupaten Gresik sudah berada di level 3. Inspektorat di bawah pembinaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomitmen untuk menaikkan level SPIP menjadi level 3 dimana nilai QA maturitasnya bertambah dari nilai sebelumnya pada tahun 2024. Sedangkan pada visi Presiden terpilih 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia maju, menuju

Indonesia emas 2045” dengan misi (Asta Cita) ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan” dengan salah satu program prioritasnya yang ke 4 yaitu “Pencegahan dan pemberantasan korupsi” yang dituangkan dalam RPJMN 2024-2029 yang kemudian di jabarkan dalam salah satu sasaran Pembangunannya yang ke 1 yaitu “terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak serta serta sistem politik yang fungsional” Dengan indikatornya yang ke 2 yaitu “Indeks Persepsi korupsi” dengan arah kebijakan yang ke 3 yaitu Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)” dengan intervensi kebijakannya berupa “Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang diarahkan untuk mewujudkan sistem anti korupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis yang dilakukan melalui (a) penguatan kelembagaan gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis, **(b) pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi dan gerakan budaya anti korupsi, (c) pencegahan tindak pidana korupsi,** serta (d) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Maka Inspektorat Kabupaten Gresik berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai tugas dan fungsi nya yaitu kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal maupun dengan tujuan tertentu serta kegiatan pendampingan dan asistensi dengan pada subkegiatan “Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” dengan kegiatan “Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK” dan Monitoring Center Surveillance Prevention (MCSP) KPK.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Inspektorat Kabupaten Gresik perlu ditetapkan tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat

Kabupaten Gresik yang akan dicapai pada kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 ditetapkan untuk memberikan arah tahapan program dan kegiatan secara umum yaitu “Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN”, sedangkan tujuan yang sesuai visi dan misi bupati yaitu “Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani (smart governance)”, disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap misi serta program yang telah ditetapkan. Adapun sasaran Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan adalah “Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, dan Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui PM SPIP Terintegrasi”.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Didalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai :

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gresik, pada dasarnya kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik adalah sebagai “Konsultan dan Penjamin mutu” setiap pelaksanaan program dan kegiatan, yang akan memberikan jaminan bagi PD untuk menentukan pencapaian sasaran dan pengukuran tingkat kesuksesan atas tujuan yang akan dicapai guna mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

3.3.1 Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan untuk rumusan program, kegiatan dan subkegiatan di Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Pencapaian SDGs;
3. Pencapaian 9 (sembilan) Program Prioritas Pembangunan di Kabupaten Gresik yakni:
 - a. Gresik Akas;
 - b. Gresik Seger;
 - c. Gresik Mapan;
 - d. Gresik Agropolitan;
 - e. Gema Karya;
 - f. Gresik Cerdas;
 - g. Gresik Sehati;
 - h. Gresik Barokah; dan
 - i. Gresik Lestari.
4. Pencapaian Akuntabilitas keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gresik;
5. Peningkatan kapabilitas APIP;
6. Peningkatan maturitas SPIP;
7. Fokus binwas pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
8. Penajaman fokus dan sasaran pengawasan pada tata Kelola :
 - a. Pengelolaan APBD.
 - b. Pelayan Publik (Perizinan dan RS)
 - c. BUMD
 - d. Keuangan desa
9. Fokus pengawasan kinerja Pemda :
 - a. Pengendalian inflasi daerah
 - b. Penurunan stunting
 - c. Penurunan Kemiskinan
 - d. Ketahanan Pangan
 - e. Peningkatan pariwisata
 - f. Sistem persampahan

10. Permendagri No 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
11. Perbup Gresik No 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada tahun 2025 Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Program dan Kegiatan.

Program, kegiatan dan subkegiatan di Inspektorat Kabupaten Gresik pada tahun 2025, jumlah program sebanyak 3 program, jumlah kegiatan sebanyak 11 kegiatan dan jumlah subkegiatan sebanyak 35 subkegiatan.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Penyebaran lokasi program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Gresik bersifat lokalitas kewenangan Inspektorat Kabupaten Gresik, lintas PD dan kewilayahan.

Program, Kegiatan dan subkegiatan yang bersifat Lokalitas Kewenangan Inspektorat Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD;
3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;

- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan rumah Tangga;
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan :
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor.
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Kelompok Sasaran :
Inspektorat Kabupaten Gresik
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, meliputi kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal, meliputi sub kegiatan :
 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 3. Reviu Laporan Kinerja;
 4. Reviu Laporan Keuangan;
 5. Pengawasan Desa;
 6. Kerjasama Pengawasan Internal;
 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

- b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, meliputi sub kegiatan :
 - 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - 2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
 Kelompok Sasaran :
 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, meliputi kegiatan :
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, meliputi sub kegiatan :
 - 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - b) Pendampingan dan Asistensi, meliputi sub kegiatan :
 - 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
 Kelompok Sasaran :
 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Total kebutuhan dana Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2025 berdasarkan hasil analisis kebutuhan sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan pada Permendagri No 15 tahun 2024 yaitu anggaran untuk pengawasan pada APIP Inspektorat adalah minimal 0,5% (diluar gaji dan TPP) pada total belanja APBD 2025 dan diatas nilai Rp 15 miliar rupiah dengan total nilai APBD Pemkab diatas 2 triliun rupiah. Dan jika tidak terpenuhi maka akan mendapat sanksi yaitu tidak mendapat nomor registrasi terhadap hasil evaluasi APBDnya oleh Kemendagri.

3.3.3 Kesesuaian Rumusan Program dan Kegiatan antara Rancangan Akhir RKPD dengan Perubahan Renja PD.

Keseluruhan rumusan program dan kegiatan terdapat keterpaduan dan sinkronisasi antara rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan Perubahan Rencana Kerja PD Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025. Program dan Kegiatan yang dirancang Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2025 terdiri dari :

Program Utama

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan meminimalisir penyimpangan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan baik dalam hal keuangan maupun kinerjanya bagi aparatur pemerintah.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP dengan cara perumusan kebijakannya, pendampingan, asistensi, koordinasi, monitoring, evaluasi, verifikasi serta penilaian segala urusan kegiatan pemerintahan dan pembangunannya.

Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan sarana serta prasarana penunjangnya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

Table 2.7 (T-C.33)

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Gresik
Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01	INSPEKTORAT				31.072.512.995,25				31.815.410.434
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		100%	17.801.097.195,25			100%	18.674.763.278
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Inspektora t	7	268.350.000			7	265.678.000
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	6	226.194.600	Dana alokasi umum		6	223.194.600
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat	0	0	Dana alokasi umum		0	0

6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat	0	0	Dana alokasi umum		0	0
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Inspektorat	0	0	Dana alokasi umum		0	0
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat	0	0	Dana alokasi umum		0	0
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	2	19.123.600	Dana alokasi umum		2	19.287.600
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	1	23.031.800	Dana alokasi umum		1	23.195.800
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektora t	3	9.596.414.895			3	9.827.635.460
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	46	9.566.234.895,25	Dana alokasi umum		69	9.798.355.460
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Inspektorat	2	24.420.000	Dana alokasi umum		2	23.520.000

6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat	1	5.760.000	Dana alokasi umum		1	5.760.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pendidikan dan Latihan yang diikuti	Inspektora t	3	1.718.857.400			3	2.004.208.600
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat	34	1.718.857.400	Dana alokasi umum		45	2.004.208.600
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektora t	7	2.826.363.160			7	3.840.544.438
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	50	152.368.000	Dana alokasi umum		50	133.759.000
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Inspektorat	0	0	Dana alokasi umum		0	0
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Inspektorat	6	469.342.000	Dana alokasi umum		6	534.732.218
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat	12	47.377.000	Dana alokasi umum		12	90.022.100
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Inspektorat	6	51.611.000	Dana alokasi umum		6	51.611.100

6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	250	534.319.760	Dana alokasi umum		250	833.007.520
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspektorat	1	1.571.345.400	Dana alokasi umum		1	2.197.412.500
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektora t	50	1.914.731.540			50	508.876.580
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Inspektorat	0	1.413.810.500	Dana alokasi umum		0	0
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Inspektorat	0	0	Dana alokasi umum		0	0
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Inspektorat	50	500.921.040	Dana alokasi umum		50	508.876.580
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektora t	2	293.918.000			3	293.918.000
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	2	11.990.000	Dana alokasi umum		2	11.990.000
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat	8	281.928.000	Dana alokasi umum		8	281.928.000

6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Inspektora t	100	1.182.462.200			100	1.933.902.200
6.01.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Inspektorat	1	104.920.900	Dana alokasi umum		1	206.360.900
6.01.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Inspektorat	16	939.359.500	Dana alokasi umum		16	1.239.359.500
6.01.01.2.09.000 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Inspektorat	0	0	Dana alokasi umum		0	0
6.01.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Inspektorat	100	116.149.800	Dana alokasi umum		100	316.149.800
6.01.01.2.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Inspektorat	1	22.032.000	Dana alokasi umum		1	172.032.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut audit internal	SKPD di Lingkunga n Pemkab Gresik	100%	4.382.032.300			100%	4.439.931.866
		Persentase tindak lanjut audit eksternal		100%				100%	

		Persentase tindak lanjut aduan masyarakat		100%				100%	
		Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A		100%				100%	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	7	3.977.275.400			7	4.166.315.766
		Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Eksternal		1				1	
		Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah		4				4	
		Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE		2				2	
		Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE		2				2	
		Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE		1				1	
		Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi ARG dan PPRG		1				1	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	35	1.155.139.100	Dana alokasi umum		40	1.146.194.100
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	35	32.969.900	Dana alokasi umum		40	83.182.166
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	22	681.428.600	Dana alokasi umum		16	78.607.000

6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	60	99.777.000	Dana alokasi umum		89	589.658.000
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	18	77.594.500	Dana alokasi umum		18	113.165.000
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	1	1.305.931.900	Dana alokasi umum		2	1.264.000.100
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	4	624.434.400	Dana alokasi umum		4	891.509.400
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	2	404.756.900			2	273.616.100
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	12	110.989.500	Dana alokasi umum		12	93.589.500
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	12	293.767.400	Dana alokasi umum		12	180.026.600
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	100%	8.889.383.500			100%	8.700.715.290
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Jenis Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasnya yang Disusun	Inspektora t	1	242.138.300			1	121.102.200

6.01.03.2.01.000 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Inspektorat	5	242.138.300	Dana alokasi umum		5	121.102.200
6.01.03.2.01.000 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Inspektorat	0	0	Dana alokasi umum		0	0
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	46	8.647.245.200			46	8.579.613.090
		Jumlah Unit Pelayanan yang memperoleh Predikat WBK/WBBM	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	2				2	
6.01.03.2.02.000 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	46	2.960.038.000	Dana alokasi umum		46	2.936.056.890
6.01.03.2.02.000 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	46	102.394.000	Dana alokasi umum		46	106.499.000
6.01.03.2.02.000 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	5	4.614.403.700	Dana alokasi umum		5	4.582.255.200
6.01.03.2.02.000 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	46	970.409.500	Dana alokasi umum		46	954.802.000

Total	31.072.512.995,25				31.815.410.434
-------	-------------------	--	--	--	----------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2025 tidak banyak terjadi perubahan dibanding tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan baru telah masuk dalam penjabaran program tersebut, sehingga berpengaruh terhadap struktur anggaran belanja. Pendanaan anggaran belanja Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gresik. Program Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Table 2.8

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 Inspektorat

No. Rekening	Urusan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Targ et Capa ian	(Anggaran Dalam Juta Rupiah)	
					2.025	2026
1	2	3	4	5	6	7
6.01	INSPEKTORAT				31.072.512 .995,25	31.815.4 10.434
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100 %	17.801.097 .195,25	18.674.7 63.278
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7	268.350.00 0	265.678. 000
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	226.194.600	223.194.6 00
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0

6.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
6.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspekt orat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	0
6.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
6.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspekt orat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	19.123.600	19.287.60 0
6.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspekt orat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	23.031.800	23.195.80 0
6.01.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspek torat	Jumlah Jenis Laporan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	9.596.414. 895	9.827.63 5.460
6.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspekt orat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	9.566.234.8 95,25	9.798.355 .460
6.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Inspekt orat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	2	24.420.000	23.520.00 0
6.01.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	5.760.000	5.760.000
6.01.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspek torat	Jumlah Pendidikan dan Latihan yang diikuti	3	1.718.857. 400	2.004.20 8.600
6.01.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspekt orat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28	1.718.857.4 00	2.004.208 .600
6.01.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspek torat	Jumlah Jenis Laporan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	2.826.363. 160	3.840.54 4.438
6.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Inspekt orat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50	152.368.000	133.759.0 00

	Kantor		yang Disediakan			
6.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspekt orat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	0	0
6.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspekt orat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	469.342.000	534.732.2 18
6.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspekt orat, Luar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	47.377.000	90.022.10 0
6.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	51.611.000	51.611.10 0
6.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspekt orat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	534.319.760	833.007.5 20
6.01.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspekt orat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1.571.345.4 00	2.197.412 .500
6.01.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspek torat	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50	1.914.731. 540	508.876. 580
6.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspekt orat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	1.413.810.5 00	0
6.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Inspekt orat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0
6.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspekt orat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50	500.921.040	508.876.5 80
6.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspek torat	Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	293.918.00 0	293.918. 000
6.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspekt orat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	11.990.000	11.990.00 0
6.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Inspekt orat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	281.928.000	281.928.0 00
6.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspek torat	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	1.182.462. 200	1.933.90 2.200

6.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspekt orat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	104.920.900	206.360.900
6.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspekt orat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	939.359.500	1.239.359.500
6.01.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Inspekt orat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	0
6.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspekt orat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	116.149.800	316.149.800
6.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspekt orat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	22.032.000	172.032.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Persentase tindak lanjut audit internal	100 %	4.382.032.300	4.439.931.866
			Persentase tindak lanjut audit eksternal	100 %		
			Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	100 %		
			Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A	100 %		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7	3.977.275.400	4.166.315.766
			Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Eksternal	1		
			Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4		
			Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2		
			Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2		
			Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1		

			Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi ARG dan PPRG	1		
6.01.02.2.0 1.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35	1.155.139.100	1.146.194.100
6.01.02.2.0 1.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35	32.969.900	83.182.166
6.01.02.2.0 1.0003	Reviu Laporan Kinerja	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	22	681.428.600	78.607.000
6.01.02.2.0 1.0004	Reviu Laporan Keuangan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	60	99.777.000	589.658.000
6.01.02.2.0 1.0005	Pengawasan Desa	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	18	77.594.500	113.165.000
6.01.02.2.0 1.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	1.305.931.900	1.264.000.100
6.01.02.2.0 1.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	624.434.400	891.509.400
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2	404.756.900	273.616.100
6.01.02.2.0 2.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12	110.989.500	93.589.500

6.01.02.2.0 2.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	293.767.400	180.026.600
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	100 %	8.889.383.500	8.700.715.290
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Jenis Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasnya yang Disusun	1	242.138.300	121.102.200
6.01.03.2.0 1.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5	242.138.300	121.102.200
6.01.03.2.0 1.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	0	0	0
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	46	8.647.245.200	8.579.613.090
			Jumlah Unit Pelayanan yang memperoleh Predikat WBK/WBBM	2		
6.01.03.2.0 2.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	46	2.960.038.000	2.936.056.890
6.01.03.2.0 2.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	46	102.394.000	106.499.000
6.01.03.2.0 2.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	4.614.403.700	4.582.255.200

6.01.03.2.0 2.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	SKPD di Lingku ngan Pemka b Gresik	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46	970.409.500	954.802.0 00
-----------------------	---	--	--	----	-------------	-----------------

BAB V

PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENJADI PERHATIAN

Sebagai upaya agar tugas dan fungsi organisasi dapat terlaksana dengan baik, maka perencanaan kinerja organisasi perlu dilaksanakan dengan tepat dan terkendali. Dukungan dan peranan seluruh elemen yang ada dan yang terkait harus tersinergi dalam satu kesatuan hingga tujuan dari organisasi dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk itu dedikasi, kedisiplinan dan kecakapan serta loyalitas dan integritas adalah hal yang harus dipadukan, sehingga proses pelaksanaan tugas dapat terealisasi dengan baik. Output Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik adalah Program Tahunan Inspektorat Kabupaten Gresik yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Inspektorat Kabupaten Gresik yaitu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berdasarkan risiko (PPBR). Pada tahun 2025 kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Gresik berjumlah 35 Subkegiatan sebagai penjabaran dari 11 kegiatan dan 3 program dengan jumlah anggaran dari APBD sebesar Rp. 31.072.512.995,25.

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

- a. Di dalam penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Gresik.

- c. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Gresik selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Pada akhir tahun 2025 Inspektur akan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Inspektorat Kabupaten Gresik melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Gresik, Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

- c. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Gresik selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Pada akhir tahun 2025 Inspektur akan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Inspektorat Kabupaten Gresik melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Gresik, 25 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013